

ABSTRACT

Fiscal decentralization in the form of intergovernmental transfers is one of the key instruments in supporting inclusive and sustainable economic development. However, the government still faces two major challenges: promoting economic growth and reducing income inequality. This study aims to analyze the impact of intergovernmental transfers—including General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), and Revenue Sharing Funds (DBH)—on economic growth and income inequality in Indonesia, while considering the moderating role of regional financial accountability. The data used covers intergovernmental transfers across all regencies/cities in Indonesia from 2013 to 2023, with the audit opinions of the Audit Board of Indonesia (BPK) serving as the moderating variable. The results show that: (1) intergovernmental transfers have a positive and significant effect on economic growth; (2) intergovernmental transfers have a negative and significant effect on income inequality; (3) regional financial accountability does not moderate the relationship between intergovernmental transfers and economic growth; and (4) regional financial accountability weakens the negative effect of intergovernmental transfers on income inequality. These findings indicate that fiscal decentralization policies need to be optimized to support economic development, while transparency and regional financial accountability remain crucial factors in ensuring the effectiveness and efficiency of government spending.

Keywords: intergovernmental transfers, financial accountability, economic growth, income inequality.

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal dalam bentuk transfer ke daerah merupakan salah satu instrumen dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, pemerintah masih dihadapkan pada dua tantangan utama, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja transfer ke daerah—meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)—terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia, dengan mempertimbangkan peran moderasi akuntabilitas keuangan daerah. Data yang digunakan mencakup belanja transfer ke daerah di seluruh kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2013-2023, dengan opini laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) belanja transfer ke daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; (2) belanja transfer ke daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan; (3) akuntabilitas keuangan daerah tidak memoderasi hubungan antara belanja transfer ke daerah dan pertumbuhan ekonomi; (4) akuntabilitas keuangan daerah memperlemah pengaruh negatif belanja transfer ke daerah terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal perlu dioptimalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sementara transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah tetap menjadi faktor krusial dalam memastikan efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah.

Kata kunci: belanja transfer ke daerah, akuntabilitas keuangan, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan.